



WANITA INI JADI OTAK PEREDARAN NARKOBA DI SUNGAI PINANG SAMARINDA

**MUDA
BERAHLAK
AMANAH
DINAMIS**

**ARIE
WIBOWO**

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG

ARIE
WIBOWO



WANITA INI JADI OTAK PEREDARAN NARKOBA DI SUNGAI PINANG SAMARINDA

SAMARINDA- Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam operasi yang dilakukan, Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, dua orang pelaku berhasil ditangkap.

Kasat Reskoba Polresta Samarinda Kompol Bambang Suhandoyo di Samarinda menjelaskan kronologis kejadian bermula dari laporan masyarakat tentang aktivitas peredaran narkoba di Jl. Gerilya Gg. Masjid Blok D Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sungai Pinang.

"Atas laporan tersebut, petugas melakukan observasi yang kemudian mengarah pada penangkapan seorang perempuan berinisial S," sebutnya di Samarinda, Jumat (20/10).

Dalam penggeledahan terhadap S, ditemukan barang bukti berupa 11 paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,29 gram bruto dan 6 paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,08 gram bruto.

Barang-barang tersebut sebelumnya dib-

uang oleh S. Selain itu, juga ditemukan 1 unit HP Android yang diduga digunakan dalam transaksi narkoba.

Pengembangan kasus selanjutnya mengarah pada seorang laki-laki berinisial ID, yang diduga sebagai pemasok sabu-sabu. ID diamankan di rumahnya, di Jl. Gerilya Gg. Masjid Blok D Kel. Sungai Pinang dalam Kec. Sungai Pinang, Samarinda.

Dalam penggeledahan di tempat tinggal ID, ditemukan 1 unit HP Android merk OPPO, 1 unit HP Android merk VIVO, serta uang tunai sebesar Rp. 3.950.000,- yang diduga hasil penjualan narkoba.

Kepolisian telah mengambil langkah-langkah tegas terhadap peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Kedua pelaku, S dan ID, serta barang bukti yang berhasil disita, telah diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut. Mereka akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara," pungas Bambang. (MK)



Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono

TERNAK DOMBA DILARANG, KETUA KOMISI II MINTA IDENTIFIKASI PERSOALAN SECARA AKURAT

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim sedang mengevaluasi kebijakan larangan ternak domba. Menyikapinya Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menyatakan Pemprov harus mengidentifikasi persoalan dengan akurat.

Aturan terkait larangan ternak domba ini, tertuang Draf Perubahan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 520/K.509/2020 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Kalimantan Timur sedang digodok.

Tio menilai jangan sampai larangan ternak sapi mempengaruhi sektor peternakan dan ekonomi khususnya para peternak. Segala kebijakan yang ditempuh Pemprov menurutnya harus berdampak positif kepada warga Bumi Etam.

“Tent kita dukung karena tidak boleh juga membedakan para peternak-perternak. Baik itu peternak kambing, sapi, dan seterusnya. Tapi memang ada kajian-kajian, supaya misalnya ada potensi virus-virus penyakit, yang kemudian jangan sampai mengganggu yang lain,” jelasnya.

Politisi Golkar ini menyatakan, agar Pemprov bisa mempertimbangkan faktor kewilayahan. Dia mengatakan, tantangan utama dalam pemasukan ternak domba harus bebas dari berbagai potensi penyebaran penyakit antar ternak yang beda jenis.

“Jika ada virus-virus penyakit yang menular dari domba ke hewan ternak lainnya atau sebaliknya, ini bisa jadi ancaman serius untuk industri peternakan di wilayah terkait,” pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)



Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo

ANGARAN DBON CAPAI RP31 MILIAR, SIGIT MINTA PEMPROV LAKUKAN EVALUASI

SAMARINDA - Anggaran untuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dikabarkan mencapai Rp31 Miliar. Menanggapinya,

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo meminta Pemprov Kaltim, untuk mengevaluasi besaran anggaran tersebut.

Menurutnya Pj Gubernur Kaltim, memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terkait besaran anggaran DBON tersebut.

"Ada informasi kalau DBON itu, anggarannya sekarang angkanya cukup fantastis. Ini jadi tugas Pj Gubernur untuk mengevaluasi kembali," tegasnya.

Ketua PAN Kaltim ini menerangkan, DBON semestinya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai ada kesamaan tugas dan fungsinya

dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim atau bahkan Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

"Oleh sebab itu DBON juga harus dicari tahu apakah sesuai dengan tupoksi atau kembalikan ranahnya ke Dispora atau KONI," urainya.

Sigit lebih lanjut mengatakan, evaluasi juga harus dilakukan mengingat DBON merupakan lembaga yang cenderung baru. Meskipun tujuan DBON di proyeksikan untuk meningkatkan prestasi Kaltim di bidang olahraga.

"Ini (DBON) 'kan baru jadi, tidak bisa dinilai saat ini juga. Jadi harus ada pembahasan lebih lanjut ini. Jadi tugas pemerintah," pungkasnya. (Eky/adv/dprd Kaltim)



Wakil Ketua DPRD Kaltim

SENO AJI SEBUT ALOKASI ANGGARAN UNTUK DBON KALTIM TENGAH DIPERIKSA BPK KALTIM DAN INSPEKTORAT KALTIM

SAMARINDA - Soal anggaran yang diterima Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (TK DBON) Provinsi Kaltim, Wakil

Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyebutkan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim.

Seno membeberkan, Inspektorat Kaltim juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap alokasi anggaran DBON Kaltim sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Ia mengatakan, bahwa mekanisme penggunaan dana yang di kelola DBON Kaltim yang menjadi persoalan.

"Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim dan Inspektorat Wilayah Kaltim. Sekarang ini yang jadi masalah mekanisme penggunaan dana yang mereka (DBON) kelola," jelasnya.

"Anggaran daerah yang telah dihabiskan dalam penggunaan diperun-

tukkan untuk apa? Apa yang sudah dilaksanakan? Kita luruskan. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini? Kalau KONI sudah dilakukan, nah DBON ini belum," sambungnya.

Politisi Gerindra ini lebih lanjut menerangkan, bahwa TK DBON menaungi 14 Cabang Olahraga (Cabor), terutama untuk pengembangan atlet junior. Selanjutnya setelah melakukan pengembangan atlet junior hingga menjadi atlet senior, maka pembinaan akan dilanjutkan oleh KONI Kaltim.

14 cabang olahraga yang dimaksud yakni, bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan pencak silat.

"Harapannya dari 14 cabor ini yang akan di sentuh oleh mereka. Walaupun ada beberapa cabor yang belum tersentuh anggaran. (Eky/adv/dprdkaltim)



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati

WAKIL KETUA KOMISI IV DORONG UKS JALIN KERJASAMA DENGAN PUSKESMAS

SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Puji Setyowati meminta setiap sekolah untuk menjaga dan memperhatikan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Musabab, UKS menurutnya bagian penting untuk kemajuan pendidikan.

Politisi Demokrat ini menilai, kehadiran UKS di sekolah merupakan wadah pertolongan pertama bila siswa sakit atau terjadi insiden. Sehingga penting bagi sebuah sekolah untuk menghadirkan UKS di lingkungannya.

"Karena mereka jauh dari tempat tinggalnya, sehingga diharapkan UKS dapat menjadi tempat untuk mereka beristirahat atau mendapatkan pen-

anganan," terangnya kepada awak media, Kamis (19/10/2023).

Bila perlu menurut Puji, UKS bekerjasama dengan unit kesehatan lain di luar sekolah seperti Puskesmas. Sehingga bila terjadi hal yang fatal dapat segera ditangani oleh tenaga kesehatan dengan segera.

"Dokter bisa sewaktu-waktu dipanggil atau kerja sama dengan pola penjadwalan rutin kunjungan ke UKS," jelasnya.

Selain itu ujarnya, UKS dapat dimanfaatkan warga yang bermukim disekitar sekolah bila harus mendapatkan penanganan dasar bila telah terjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan. **(eky/adv/dprdkaltim)**



ANDI FAISAL SEBUT POTENSI PERTANIAN HARUS DIDUKUNG ANGGARAN DARI DAERAH DAN PUSAT

PASER - Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan pertanian yang acap kali dikeluhkan oleh para petani di Paser.

Menurutnya, untuk mendorong kemandirian pangan di Kaltim, alat pertanian, hingga infrastruktur pertanian, harus memadai agar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Dan Kabupaten Paser memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian.

Apalagi Kabupaten Paser, sangat dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN), yang berada di Kecamatan Sepaku. Artinya Paser harus mampu menyokong kebutuhan pangan di Kaltim dan di IKN

"Kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat, kami ini pesuruh. Itulah gunanya kami turun ke masyarakat untuk mengetahui perma-

salahan yang terjadi hingga tingkat desa," ujarnya belum lama ini.

Namun sebagai Anggota DPRD Kaltim, menurutnya, ada keterbatasan wewenang yang tertuang dalam Peraturan Gubernur, untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat. Sehingga Andi Faisal menilai butuh sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat.

"Sebagai anggota dprd mewujudkan aspirasi mereka, namun mempunyai persyaratan yang harus mereka penuhi. Harus masuk di Musrembang dan ada nomor SIPD-nya, baru lah itu bisa diusulkan di Provinsi. Karena persyaratannya mutlak," jelasnya.

"Jadi memang harus kolaborasi, Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan RI. Supaya bisa mewujudkan apa yang jadi kebutuhan para petani," pungkasnya. **(eky/Adv/DPRDKaltim)**



TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp 698.000,- 30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

Afternoon
Tea



FREE

Mini Mantou
5 pcs



➔ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



SOSIALISASI SP4N-LAPOR, KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN PENAJAM SIAP LAKSANAKAN



KUNJUNGI PPU, DISKOMINFO
BONTANG STUDI TIRU
PENERAPAN KIM



Kegiatan sosialisasi digelar bertempat di ruang pertemuan kantor Kecamatan Penajam, Kamis (19/10/23). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

SOSIALISASI SP4N-LAPOR, KELURAHAN DAN DESA DI KECAMATAN PENAJAM SIAP LAKSANAKAN

PPU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) terus melanjutkan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Kali ini giliran kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Penajam.

Bertempat di ruang pertemuan kantor Kecamatan Penajam, Kamis (19/10/23). Hadir Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang dan Sekretaris Camat (Sekcam) Penajam Rakhmadi.

Herlambang menyampaikan bahwa di era digitalisasi saat ini masyarakat bisa mendapatkan informasi den-

gan mudah. Satu sisi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Oleh karena itu muncul dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) dalam rangka pelayanan publik, artinya pemerintah memerlukan umpan balik dari masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan kritik dan pendapat,” terangnya.

Dengan adanya SP4N-LAPOR! pemerintah membuka peluang sebesar-sebesar-nya kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.

“Hari ini diberikan pelati-

han bagi aparaturnya desa dan kelurahan terkait pengaduan pelayanan publik, agar tertata, etika berorganisasi ada, etika menyampaikan pendapat ada dan etika menyampaikan pengaduan juga ada,” jelas Herlambang.

Pada kesempatan yang sama, Sekcam Penajam Rakhmadi menyampaikan SP4N-LAPOR! merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat.

“Kami sangat mendukung untuk bisa diteruskan kepada masyarakat, yang mendapatkan sosialisasi hari ini agar dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat,” pungkasnya. **(ADV/SBK)**



Studi tiru dan pemaparan penerapan KIM di PPU digelar di ruang Media Center Diskominfo PPU, Jumat (20/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

KUNJUNGI PPU, DISKOMINFO BONTANG STUDI TIRU PENERAPAN KIM

PPU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) kedatangan rombongan Diskominfo Kota Bontang, Jumat (20/10/2023). unjungan itu dalam rangka studi tiru pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kunjungan rombongan Diskominfo Bontang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Ilham Wahyudi. Menyambutnya, Kepala Diskominfo PPU, Khairudin yang didampingi oleh Kepala Bidang Sumberdaya TIK dan Statistik Fitriani dan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan Siswanto di ruang Media Center.

Khairudin sangat mengapresiasi kunjungan untuk menggali informasi mengenai strategi kegiatan pembinaan KIM di PPU untuk diimplementasikan. Dalam kesempatan itu, Ketua KIM Panguripan Desa Sumber Sari Alif Mustofa, memberikan pemaparan terkait pengembangan dan pemberdayaan KIM yang sudah dijalankan dengan baik di Desa Sumber Sari.

"Kami juga mengundang Ketua KIM dari Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu yang akan memberikan pemaparan program yang sudah dijalankan di desanya," ungkapnya.

Ia juga memberikan penjelasan bahwa Diskominfo tidak bisa berdiri sendiri, yang artinya seluruh perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah. Baik Pemkab PPU maupun Pemkot Bontang yang saling membutuhkan supporting untuk bersama-sama membangun informasi, yang merupakan bagian dari

corong pemerintah.

"Sementara KIM itu sendiri adalah perpanjangan tangan dari Kominfo untuk, menyebarkan informasi-informasi yang berada di lingkup desa-desa," kata Khairudin.

Seperti diketahui, Diskominfo PPU telah sukses melakukan pemberdayaan dan pengembangan KIM yang sudah terintegrasi. Hal inilah menjadi inspirasi Diskominfo Kota Bontang berkunjung ke PPU untuk studi tiru pembinaan terhadap KIM.

Dengan adanya UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik semakin mendorong pentingnya kehadiran KIM sebagai media pelayanan informasi. Keberadaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) inilah Diskominfo PPU melaksanakan pembinaan terhadap KIM. Sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan IKP Diskominfo Bontang, Ilham wahyudi menyampaikan ucapan terima kasih penerimaan kegiatan studi tiru ini. Dijelaskan bahwa di Kota Bontang KIM sudah lama tidak aktif.

Dengan studi tiru banyak hal baru yang di dapat. Dipastikan selanjutnya hasil dari kunjungan ini akan diimplementasikan dan berkembang bersama-sama dengan saling sharing terkait KIM yang ada di PPU.

"Kami sudah memiliki hubungan baik selama ini dengan Pemerintah Kabupaten PPU dan melihat bahwa KIM yang ada disini sudah berjalan cukup baik," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



PEMDES SUMBER SARI TERUS KEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN



**Pemkab Kukar Terima Penghargaan dari
BPJS Ketenagakerjaan**



Kawasan pertanian di Desa Sumber Sari. (Ady/Radar Kukar)

PEMDES SUMBER SARI TERUS KEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN

TENGGARONG - Selain sektor wisata, Pemerintah Desa (Pemdes) Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu juga fokus mengembangkan sektor pertanian. Ini dilakukan lantaran Desa Sumber Sari ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Desa Sumber Sari, Sutarno, menjelaskan program pembangunan infrastruktur pertanian di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2023. Banyak mengarah pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Termasuk program karya bakti TNI, yang membangun sekitar 4 km jalan usaha tani yang sudah dilakukan pengerasan.

Selain itu juga, ada bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan ada bantuan-bantuan sarana dan produksi. Seperti pupuk, juga ada pembinaan kelompok tani (poktan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Kemudian program dari aspirasi dewan banyak yang ma-

suk. Baik melalui APBD Kukar 2023 murni maupun APBD Perubahan Kukar 2023.

"Kalau di perubahan ini saya melihat dari program yang ada Desa Sumber Sari masih sama yakni di infrastruktur. Kemudian dari Dinas Pariwisata juga ada bantuan-bantuan berupa peralatan penunjang fasilitas pariwisata," kata Sutarno Jumat (20/10/23).

Juga ada pelatihan dari desa untuk budi daya jamur tiram, ada beberapa kegiatan untuk anak muda petani milenial termasuk juga penyuluhan dibidang kesehatan pelatihan posyandu. Dan menjelang pemilu ini ada pelatihan untuk linmas, sertapelatihan pertukangan baja ringan dari Dinas PU Kukar.

"Kami berharap semua program yang sudah disusun baik di murni maupun di perubahan itu bisa terealisasi semua. Baik program dari APBD maupun kegiatan aspirasi bisa terserap di anggaran perubahan tahun 2023 ini." tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Wabup Kukar, Rendi Solihin, saat menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden RI. (Istimewa)

Pemkab Kukar Terima Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan

TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terima penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan "Paritrana Award". Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, di Istana Wakil Presiden RI, Jumat (20/10/2023).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Penghargaan ini menjadi bukti konkret, bahwa Pemkab Kukar serius dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Usai menerima penghargaan, Rendi Solihin mengatakan bahwa ia sangat bangga atas penghargaan yang diberikan. Karena ini merupakan penghargaan bergengsi yang hanya diberikan kepada 5 kabupaten dan kota se-Indonesia. Kukar sendiri berhasil mewakili wilayah regional Kalimantan, dengan kategori kabupaten dalam penghargaan tersebut.

"Dimulai dari tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap konsisten dalam melindungi pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Rendi.

Rendi juga menjelaskan bahwa Pemkab Kukar secara konsisten memberikan bantuan perlindungan tersebut secara beragam. Mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 100 juta.

"Ini bukti nyata Pemkab Kukar dalam melindungi seluruh pekerja karena pekerja di Kukar bukan hanya ASN, pekerja perusahaan dan buruh tetapi ada petani, nelayan dan juga buruh tani Atau buruh perkebunan," imbuhnya.

Rendi juga berharap seluruh pekerja di Kukar kedepannya bisa mendapat perlindungan ketenagakerjaan. Dan ini bentuk komitmen Kukar untuk menuju Indonesia Universal Coverage yang akan datang.

Sampai saat ini, ia mengungkapkan bahwa sudah sekitar 52 ribu pekerja rentan yang sudah dilindungi oleh Pemkab Kukar. Khususnya pekerja rentan seperti petani, nelayan dan buruh. "52 ribu

sudah diberi coverage dan kedepannya akan terus ditingkatkan jumlahnya dan data kemiskinan di Kukar juga bisa mendapat perlindungan kedepan," ungkapnya.

Rendi juga mengatakan Pemkab Kukar akan terus meningkatkan program ini. Dan juga mensosialisasikan dan mengawal program ini untuk membangun kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta memperluas cakupan kepesertaan melalui dukungan pemkab, perusahaan, dan stakeholder lainnya.

Dia menekankan bahwa Kukar akan terus berkomitmen dalam program ini. Sehingga pekerja rentan di desa pun bisa ikut merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Untuk stakeholder terkait bisa membantu para pekerja rentan untuk bisa mendaftarkan diri dan menerima manfaatnya. Karena masih banyak pekerjaan rentan yang tidak paham atau tidak mengetahui bagaimana manfaat dan fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras bebas cemas," tutupnya. (Adv)

Pemulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i



Pelaksanaan MTQ tingkat Kukar pada tahun 2022 lalu. (Istimewa)

Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Matangkan Persiapan MTQ ke-44 Tingkat Kabupaten

TENGGARONG - Jelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), sejumlah persiapan terus dikebut. Acara yang diselenggarakan di Kecamatan Kota Bangun Darat ini, sudah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan pemondokan para kafilah.

“Pemondokan (sudah) siap dan akan diumumkan di expose MTQ pada 2 November,” ujar Camat Kota Bangun Darat, Julkifli.

Acara yang terpusat di Lapangan Sepak Bola Kota Bangun III, Desa Kota Bangun III, akan digelar selama sepekan penuh. Sejak tanggal 9-16 November 2023, dan pembukaan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023.

Selain itu, panitia pelaksana (penpel) akan mulai menyiapkan lokasi acara sejak tanggal 20 Oktober 2023. Terutama untuk perlengkapan di area utama pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini. Termasuk membuat peta untuk pemondokan para kafilah yang berasal dari 20 kecamatan.

Julkifli pun berharap agenda MTQ di Kota Bangun Darat bisa membawa keberkahan bagi masyarakatnya. Membumikan Alquran dan semakin meningkat keimanan dan ketakwaan, serta membuat masyarakat menjadi lebih giat lagi dalam membaca Alquran.

“Hadirnya MTQ ini kami harap ada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di 10 hari ini,” tutup Julkifli. (adv)



Pemkab Kukar Buka Lomba Balap Ketinting Pangdam VI Cup 2023

TENGGARONG - Ratusan pembalap ketinting, ramaikan Open Race Ketinting Sport Mahakam Pangdam VI Cup 2023. Olahraga balap air yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-78 tahun 2023, dilaksanakan selama tiga hari. Sejak tanggal 10-12 Oktober di sekitar Pelabuhan Pulau Kumala Tenggarong.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, mengatakan olahraga air ini diharapkan mampu menjadi potensi wisata baru di Kukar, dengan kearifan lokalnya. Hingga akhirnya bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui retribusi biaya pariwisata.

Tak hanya itu, balap ketinting yang menjadi olahraga lokal asli Kukar ini sudah menjadi tradisi dan budaya. Maka memang perlu dukungan penuh dari pemerintah. Dengan secara rutin dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Karena dianggap mampu menarik wisatawan, ditambah memiliki pengemarn-

ya tersendiri.

"Kita harapkan olahraga kreasi ini terus berkembang dengan baik, mengingat peminatnya juga banyak dan penontonnya selalu melimpah ruah sehingga dapat memberikan hiburan kepada masyarakat," jelas Dafip saat membacakan sambutan bupati Kukar.

Pemkab Kukar pun berharap balap ketinting bisa menjadi agenda pariwisata di Kukar. Karena ikut memperkenalkan objek wisata di Kukar. Tak hanya itu, dengan adanya agenda seperti ini, akan ikut mengerek pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebanyak 4 kategori lomba ketinting yang diselenggarakan. Yakni Kelas 500 CC Piston 94 Kategori Veteran, Kelas 230 CC Piston 75 Kategori Umum, Kelas 500 CC Piston 94 Kategori Umum 2 Orang Joki Depan dan Kelas 500 CC Piston 94 kategori Umum 2 Orang Joki Belakang. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i



BCC DAN PAWAI BUDAYA 2023 DIGELAR, AJANG PROMOSI WISATA BONTANG SECARA NASIONAL



BACA HALAMAN A2

**Progres Pembangunan Capai
70 Persen, McDonalds Bakal
Launching Akhir Oktober**





Peserta BCC yang Tampil dengan Kostum Budaya. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

BCC dan Pawai Budaya 2023 Digelar, Ajang Promosi Wisata Bontang secara Nasional

BONTANG – Bontang City Carnival (BCC) dan Pawai Budaya kembali digelar dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Bontang pada Sabtu (21/10/2023) pagi ini, yang berlangsung di simpang 3 Ramayana Bontang.

Sebanyak 34 peserta dalam kategori Karnaval dan 56 peserta dalam kategori Pawai Budaya turut memeriahkan BCC dan Pawai Budaya tahun 2023.

Wali Kota Bontang, Basri Rase, dalam sambutannya saat membuka BCC dan Pawai Budaya, menyatakan bahwa BCC dan Pawai Budaya diadakan dalam rangka peringatan HUT Kota Bontang yang ke-24 pada tahun 2023.

Ia menjelaskan bahwa BCC juga merupakan upaya untuk melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kota Bontang dengan beragamnya budaya yang ada. Selain itu, BCC juga diharapkan dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Bontang.

"Kami berharap agar BCC dapat menjadi salah satu

kegiatan yang diadakan setiap tahunnya," ujarnya.

Basri juga menegaskan bahwa tema dari pelaksanaan BCC kali ini adalah "Kreativitas Hebat, Harmoni Budaya Beradab." Selain sebagai sarana promosi pariwisata Kota Bontang kepada masyarakat di luar daerah, BCC juga melibatkan tokoh-tokoh nasional dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari luar Kota Bontang.

"Dengan adanya BCC, kita ingin mengangkat nama Kota Bontang di tingkat regional, nasional, dan internasional. Selain itu, BCC memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang dan memberikan dampak ekonomi positif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat," tambah Basri.

Dalam proses penilaiannya, panitia BCC dan Pawai Budaya mempertimbangkan unsur ketradisional dan keragaman kostum budaya yang ditampilkan. (Yah)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Antusias masyarakat datang sejak pagi menyaksikan BCC dan Pawai Budaya. (Yahya Yabo/Media Kaltim)

Kemeriahan BCC dan Pawai Budaya Pagi Ini, Disambut Antusias Warga Bontang

BONTANG – Bontang City Carnival (BCC) dan Pawai Budaya yang dilaksanakan Sabtu (21/10/2023) pagi ini di simpang tiga Ramayana mendapatkan antusias masyarakat Bontang. Terlihat sejak pagi masyarakat telah datang untuk menyaksikan BCC dan pawai budaya.

Warga Belimbing RT 26, Doni mengatakan dirinya datang bersama dengan keluarganya sejak pukul 7.00 WITA. Ia sengaja datang untuk menyaksikan BCC untuk mengajak keluarganya yang baru pertama kali melihat BCC tahun ini.

"Baru pertama kali. Sengaja untuk menonton. Lumayan meriah, tapi jadwalnya sepertinya lumayan ngaret (telat)," katanya. Ia mengharapkan BCC setiap tahunnya dapat lebih meriah dan Kota Bontang dapat semakin maju. "Semoga makin meriah lagi dan Bontang semakin maju," ungkapnya.

Hal senada disampaikan warga Kelurahan Api-api, Nia mengatakan sangat antusias menonton BCC setiap tahunnya. Untuk tahun ini, ia menyaksikan anaknya yang mengikuti pawai pada kelompok pencah silat.

"Bagus, setiap tahunnya melihat dan menonton. Lebih antusias sangat tinggi. Semangat nonton biarpun panas," kata Nia saat sedang menyaksikan BCC, Sabtu (21/10/2023).

Warga lainnya dari Kelurahan Loktuan, Suwito mengatakan telah datang sejak pukul 6.30 WITA bersama keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa menyaksikan BCC setiap tahunnya yang dilaksanakan di Kota Bontang.

"Datang karena lihat hiburan, setiap tahun nonton," kata Suwito, warga RT 46 Kelurahan Loktuan.

Selanjutnya, ia mengharapkan BCC dapat berlangsung lebih meriah setiap tahunnya sebagai bagian dari hiburan masyarakat.

"Lebih meriah saat ini karena dari pagi penonton banyak. Bahkan jalanan telah dialihkan dari jalan depan Polres Bontang. Lebih baik dari tahun sebelumnya, berjalan dengan baik," harapnya. BCC dan Pawai kebudayaan dimulai dengan arak-arakan panji keberhasilan. (Yah)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. (Yusva Alam)

BCC Diharap Dapat Mendulang PAD

BONTANG – Anggota dewan berharap gelaran Bontang City Carnival (BCC) tak hanya sebagai sebuah hiburan dan unjuk seni kebudayaan, atau penggugur kewajiban event 77, namun juga mampu mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023, yang mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Senin (16/9/2023) lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Dikatakan pimpinan rapat, Nursalam, bahwa saat ini Bontang ditarget untuk menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Lantaran PAD Bontang masih berada di angka 12 persen, dimana yang seharusnya minimal 21 persen agar bisa mandiri.

Karenanya dewan selalu siap mendukung kegiatan dan kebijakan apapun yang dibuat pemerintah daerah, asalkan dapat menunjang peningkatan PAD.

“Apun itu yang dibuat pemerintah kita selalu support,” ujarnya.

Termasuk salahsatunya event BCC ini. Event yang sudah 2 kali terselenggara ini, hendaknya juga mampu meningkatkan PAD. Agar dapat meningkatkan PAD, maka event budaya ini harus mampu mendatangkan minat orang-orang dari luar daerah untuk datang ke Bontang menyaksikan event ini.

“Kalau hanya meningkatkan UMKM saat event berlangsung memang iya. Tapi event ini belum menciptakan multiplier effect, karena belum mampu menarik minat orang luar datang. Kalau orang luar datang, imbasnya akan ke penginapan, tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya,” bebernya.

Karenanya dalam rapat tersebut, pihaknya meminta agar penyelenggara BCC dapat terus meningkatkan kualitas event tahunan tersebut, dan juga mempromosikan besar-besaran. Tujuannya agar semakin banyak yang tahu tentang event ini di luar daerah, sehingga dapat memancing untuk datang menyaksikan. (al/adv)



Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. (Yusva Alam)

Legislatif Pertanyakan Kenapa Peserta BCC Tak Diberi Bantuan Dana? Ini Jawabannya!

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sutarmin mempertanyakan mengapa dalam event Bontang City Carnival (BCC) 2023 tidak memberikan bantuan dana bagi para peserta?

Pertanyaan itu terungkap saat Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang terkait event BCC 2023. Mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Senin (16/9/2023) lalu di Ruang Rapat Lantai II DPRD Bontang.

Sutarmin merasa seharusnya para peserta perlu mendapat bantuan dana, lantaran kebutuhan pawai dan karnaval ini cukup banyak. Peserta harus menyiapkan bahan-bahan untuk membuat penampilan terbaik mereka.

"Harusnya peserta dibantu. Tapi kok tidak. Ini jadi pertanyaan saya?" ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bontang, Bambang Cipto Mulyono menanggapi pertanyaan tersebut. Menurutnya, pihaknya selaku penyelenggara memang sengaja tidak memberikan bantuan dana bagi peserta. Hal itu agar

peserta terpicu untuk dapat menampilkan performa terbaiknya agar menjadi juara.

"Takutnya kalau mereka diberikan bantuan dana, mereka tidak akan peduli menang atau kalah. Toh mereka akan berpikir sudah mendapatkan bantuan untuk menyiapkan penampilan mereka, kalah pun tidak jadi masalah," bebernyanya.

Namun diakuinya, selama penyelenggaraan BCC masih ada peserta yang hanya mementingkan bagaimana agar bisa tampil saja, dalam artian sekedarnya saja. Mereka tidak menampilkan kualitas terbaiknya.

"Kami akan selalu berupaya tingkatkan kualitas event ini," imbuh Bambang.

Ditambahkan Bambang, event BCC ini selalu mampu menyedot animo warga Bontang untuk ikut sebagai peserta tiap tahun penyelenggaraannya. Semakin banyak yang berminat untuk menjadi peserta.

"Walaupun tidak dikasih bantuan dana, tapi jumlah pendaftar selalu membludak," pungkaskannya. (al/adv)



Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. (Yusva Alam)

Komisi I Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Kewenangan di Perairan Sekitar Bontang

BONTANG—Hampir semua OPD bermasalah dengan UU kelautan. Karenanya pemkot diminta untuk segera menuntaskan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking usai Rapat Kerja Komisi I DPRD Bontang terkait Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Selasa (3/9/2023) di Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, DPRD Bontang sudah sering mempertanyakan masalah ini di berbagai forum, salah satunya di rapat paripurna bersama Pemkot Bontang. Agar pemkot segera menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, UU kelautan ini jadi kendala, apabila belum selesai tidak bisa memberi bantuan bagi masyarakat pesisir. Karenanya dibutuhkan rekomendasi dari gubernur. Untuk mengetahui kewenangan Pemkot Bontang sampai dimana.

“Selama ini kita bingung titik 0 milnya ini dimana? Pulau terluar kan Beras Basah dan Malahing, kalau

kita bicara di sana berarti kita punya kewenangan, tapi tetap tidak bisa,” ujarnya.

Diketahui, Bontang memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibanding wilayah daratan. Namun, pengelolaan wilayah laut atau pesisir terkendala dengan adanya Undang-undang nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan lagi.

Adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional ini menyebabkan banyak pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengalami kegamangan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya. Mengacu pada pasal 18 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diubah. (al/adv)



Proyek pembangunan McDonalds. (Syakurah/Radarbontang)

Progres Pembangunan Capai 70 Persen, McDonalds Bakal Launching Akhir Oktober

BONTANG - Pembangunan Waralaba McDonald's di Kota Bontang sudah mencapai 70 persen, sebelumnya dijelaskan bahwa pembangunan ini sudah dimulai sejak Agustus lalu dan akan beroperasi akhir tahun ini.

Kepala DPMPTSP Bontang, Asdar Ibrahim melalui Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Perizinan, Idrus mengatakan, pembangunan McDonald's terus disebut, sampai saat ini pembangunan telah mencapai 70 persen dan rencananya akan launching di tahun ini juga.

"Belum bisa dipastikan kapan pembangunannya akan rampung, yang pasti rencana launching akan dilakukan pada akhir Oktober atau pertengahan November," jelasnya.

Pembangunan McDonald's sudah sesuai dan telah dilengkapi, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Site Plan, persetujuan lingkungan, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dengan kehadiran McDonald's di Kota Bontang, diharapkan dapat menarik investor agar menanamkan investasinya di Kota Bontang, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun nilai investasi McDonald's mencapai Rp 14 miliar.

"Saya yakin McDonald's akan dibuka tahun ini, karena pengerjaannya disebut siang dan malam, jadi pasti rampung sebelum tahun depan," katanya. (sya/adv)



dr Rahmawaty Sp.KFR saat mendemonstrasikan terapi pasien di RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

Instalasi Rehabilitasi Medik Tingkatkan Pelayanan, Terapi Pasien dengan Alat-alat Terbaru

BONTANG – Instalasi Rehabilitasi Medik di RSUD Taman Husada Kota Bontang memberikan pelayanan pada pasien yang mengalami gangguan gerakan motorik atau sensorik.

Pada alur pelayanan, instalasi rehabilitasi medik melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, asuransi perusahaan maupun asuransi kesehatan lainnya. Untuk pasien sendiri harus melalui rujukan dari dokter utama sebelum dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik.

Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Bontang, dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR menjelaskan, rehabilitasi medik ini merupakan layanan yang memaksimalkan fungsi seperti pada bagian yang mengalami kelemahan di bagian tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

"Keluhannya kan' kelemahan tubuh. Memaksimalkan fungsinya dengan cara meningkatkan ototnya yang tadinya lemah menjadi kuat seperti pada pasien penyakit stroke. Targetnya adalah meningkatkan fungsi dan kualitas hidup pasien," kata

dr Rahmawaty Dian, Sp.KFR, Kamis (19/10/2023).

Lanjut dr Rahmawaty dalam pelayanannya, rehabilitasi medik memaksimalkan fungsi gerak, fungsi komunikasi dan fungsi lainnya yang ada di tubuh manusia.

"Jadi layanannya kalau direhabilitasi harus diasesmen dulu oleh dokter spesialisnya. Kemudian melihat kebutuhan untuk terapi pasien hingga pemeriksaan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara," jelasnya.

Kemudian, dr Rahmawaty mengatakan dalam sehari, rehabilitasi medik bisa melayani pasien 40 hingga 60 pasien setiap hari untuk dilakukan terapi medis. Untuk tim rehabilitasi medik sendiri terdiri dari 1 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, 5 fisioterapis, 1 terapis okupasi dan 1 terapis wicara.

"Alat-alat terapi kita sudah bisa digunakan oleh semua kategori pasien. Banyak alat-alat terapi kita yang paling terbaru," ungkapnya.

Dalam kasus yang paling banyak ditangani di RSUD, dr Rahmawaty men-

gatakan yakni kasus stroke, kasus Low Back Pain (LBP), kasus radang sendi hingga kasus tumbuh kembang anak.

Dr Rahmawaty menambahkan, tantangan yang sering dihadapi seperti pasien yang terbilang banyak dengan memaksimalkan SDM dan sarana yang telah ada.

"Memaksimalkan tenaga SDM yang ada dan sarana yang ada, pasien tetap bisa kita layani," terangnya.

Untuk kelengkapan alat sendiri, di klinik rehabilitasi medik selain ada alat-alat terapi misalnya alat Diathermy, Stimulasi Syaraf dengan Listrik melalui kulit (TENS), Ultrasound terapi, di RSUD Bontang telah dilengkapi juga dengan alat-alat terapi canggih seperti High Laser Therapy, Low Laser Therapy, Shock Wave Therapy (SWT).

"Harapan kami tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sehingga semua pasien dapat memanfaatkan layanan yang dimiliki oleh RS ini," pungkasnya. (adv/yah)



Ruang terapi anak yang ada di RSUD Bontang. (Yahya Yabo)

RSUD Taman Husada Bontang Melayani Pasien Tumbuh Kembang Anak

BONTANG—Klinik rehabilitasi medik RSUD Bontang melayani pasien tumbuh kembang anak. Namun sebelum dilakukan terapi tumbuh kembang anak, tetap harus mendapatkan rujukan dari dokter spesialis anak.

Dr Rahmawaty, Sp.KFR mengatakan, rehabilitasi medik melayani pemeriksaan komprehensif untuk asesmen anak dengan kasus tumbuh kembang, sehingga dapat memberikan terapi yang tepat dan sesuai.

“Pemeriksaan tumbuh kembang anak dimulai dari dokter spesialis anak. Apabila didapatkan masalah dan membutuhkan terapi maka akan dirujuk ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Setelah dilakukan asesmen tumbuh kembang anak dilakukan evaluasi kebutuhan dan rencana terapi yang tepat. Misalnya pada kasus yang

kompleks seperti down syndrome,” kata dr Rahmawaty.

Selanjutnya, dr Rahmawaty mengatakan, pada kasus tumbuh kembang anak akan diberikan terapi yang sesuai dengan perkembangan anak mulai dari motorik kasar, bahasa, motorik halus dan personal sosial.

“Asesmen bisa dilakukan tiap bulan untuk melihat perkembangan anak,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pasien anak yang datang untuk melakukan terapi tumbuh kembang mulai dari usia bayi hingga maksimal 17 tahun dan diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

“Ketika terapi yang diberikan sudah memberikan hasil yang optimal untuk tumbuh kembang anak maka program terapi bisa dihentikan setelah dilakuka-

kan evaluasi,” katanya.

Waktu yang diperlukan untuk terapi tumbuh kembang anak dalam 1 sesi cukup lama yaitu sekitar 30-60 menit, dan juga disesuaikan dengan kondisi anak.

“Program terapi tumbuh kembang merupakan proses yang lama, ada yang sampai satu tahun hingga beberapa tahun. Tim kami di sini, selain saya sebagai dokter spesialis, ada terapis wicara, terapis okupasi, dan fisioterapis yang menangani kasus tersebut,” ungkapnya.

Sementara untuk kasus tumbuh kembang anak yang paling banyak ditangani yakni non specific speech delay, ADHD, ASD, disabilitas intelegensia, global development delay. Dalam satu hari instalasi rehabilitasi medik ini dapat menangani sekitar 10-15 pasien tumbuh kembang anak. (adv/yah)



Melatih Anak Belajar Memasak

Oleh:

Oleh Muthi' Masfu'ah AMd, CN NLP

Direktur Yayasan RK Sa'sabila, pelatih, dan penulis

AYAH dan bunda, anak usia emas, yakni usia 1-6 tahun, adalah waktu terindah bagi anak untuk belajar banyak hal. Sehingga orang tua perlu mengenalkan banyak bidang dan banyak hal kepada mereka untuk mengasah kecerdasan mereka.

Ada banyak pekerjaan rumah tangga yang bisa dijadikan pembelajaran bagi anak usia dini, salah satunya adalah kegiatan memasak. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat untuk mengembangkan aspek perkembangan anak.

Mari kita simak apa saja perkembangan yang dapat diperoleh anak saat kita mengajak mereka memasuki dunia memasak, berikut adalah 4 keunggulan belajar memasak bagi anak:

1. Keterampilan hidup anak dapat terasah.

Perlu diketahui bahwa mempelajari keterampilan dasar memasak sedini mungkin dapat digunakan sepanjang hidup mereka, membantu mereka untuk beradaptasi dengan baik hingga dewasa dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Kenalkan anak dengan berbagai macam rasa.

Salah satu manfaat terbesar memasak pada anak-anak adalah membantu mereka mengenal berbagai macam rasa. Ini dapat mengembangkan sensori mereka. Anak-anak yang dilibatkan dalam proses memasak akan lebih tertarik untuk mencoba makanan baru sehingga mereka dapat mengenal rasa yang baru juga.

Saat memasak, anak-anak mengaduk, mengukur, menggulung, memeras, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Melalui hal ini, anak dapat mengembangkan keterampilan motorik halus, seperti koordinasi tangan-mata dan kelenturan otot-otot mereka.

3. Keakraban orangtua dan anak dapat lebih terjalin.

Dapur adalah tempat yang tepat bagi orang tua untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama anak. Ini berarti dapur menjadi tempat untuk berbicara tentang apa saja dengan anak, serta menggali pengetahuan, empati, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dapur juga merupakan lingkungan yang baik bagi seluruh anggota keluarga untuk bekerja sama dan berkomunikasi, membangun hubungan yang lebih kuat.

4. Kepercayaan diri anak dapat terbangun.

Suasana hangat di dapur dapat menjadi tempat untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak. Melibatkan anak-anak dalam memasak memberikan banyak kesempatan untuk mendorong dan mengapresiasi aktivitas mereka. Anak-anak merasa sangat bangga ketika mereka berhasil menyiapkan hidangan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Sungguh menyenangkan, bukan? Yuk, ajak anak-anak kita belajar memasak sejak dini. (*)



**SAKIRMAN MINTA PEMERINTAH
BINA PETANI MILENIAL**



Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo.

TEKAN KASUS STUNTING, PENYULUH POSYANDU DIMINTA AKTIF DAMPINGI ORANGTUA

TANJUNG REDEB – Komisi I DPRD Berau mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang terus berupaya menekan angka kasus stunting di Kabupaten Berau. Sesuai dengan target dari pemerintah pusat yang ingin menurunkan stunting hingga 14 persen pada 2024.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Faletinus Keo Meo menuturkan, stunting sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Menurutnya, perlu dukungan dan peran aktif kader posyandu untuk memberikan penyuluhan kepada para orangtua agar kasus stunting segera menurun.

“Penyuluhan dari posyandu saya harap bisa terus digencarkan. Apalagi yang ada di kampung-kampung, tentu jadi prospek besar untuk menyuguhkan pola hidup sehat ibu dan anak,” ungkapnya, Kamis (19/10/2023).

Jika itu dilakukan dengan baik dan konsisten, dia menyakini pemenuhan gizi bagi bayi juga dapat terpenuhi. Terlebih sebagai tanggu-

ng jawab orangtua, yang senantiasa memberi asupan. Untuk memberikan asupan gizi pada anak menurutnya, perlu melibatkan pihak lain untuk memberikan pengetahuan kepada orangtua. Karena itu, dirinya turut mendukung kegiatan posyandu agar lebih optimal.

“Paling tidak, para orangtua yang memiliki anak bayi bisa mendapat pengalaman, pemahaman, dan bimbingan dari para kader posyandu setempat,” ujarnya.

Dirinya tidak ingin membiarkan perkembangan anak terhambat dan tidak diperhatikan. Paling tidak ada bimbingan pembinaan kader posyandu terkait persiapan menu yang harus dipenuhi. Apalagi sudah ada lokasi khusus (lokus) rawan stunting, dinilai perlu adanya intensitas pendampingan dan pembinaan untuk harus ditingkatkan.

“Apabila hal-hal seperti itu diperhatikan dengan baik, kami yakin satu atau dua tahun ke depan angka stunting di Kabupaten Berau bisa menurun,” pungkasnya. (adv)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

SAKIRMAN MINTA PEMERINTAH BINA PETANI MILENIAL

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman ingin ada regenerasi petani di Kabupaten Berau. Dia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat membina kaum milenial untuk bisa menjadi petani yang sejahtera dan memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik.

Salah satunya dengan cara membina lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian maupun mahasiswa jurusan pertanian di sekolah tinggi yang ada di Bumi Batiwakkal.

Dia mengatakan, menjadi petani bukan berarti hidupnya susah. Tapi justru menjadi petani di masa sekarang lebih menjanjikan karena didukung oleh peralatan mesin modern. “Jadi bagaimana kita bisa mengubah mindset masyarakat bahwa petani itu bukan pekerjaan yang susah. Justru penghasilannya bisa lebih besar,” jelasnya.

Diakuinya banyak generasi muda yang lebih tertarik bekerja di perusahaan tambang. Namun, dikhawatirkan jika tambang di Berau habis, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Menurutnya, selain sektor pariwisata yang dikembangkan, pertanian juga perlu dibina

seluas-luasnya.

“Mengingat potensi lahan pertanian di Berau ini belum dibuka semua. Seperti di Kampung Gurimbang ada potensi sebesar 800 hektare. Belum lagi yang ada di Kampung Buyungbuyung dan Semurut,” sebutnya.

Tinggal pemerintah menjalankan mekanisme bantuan untuk para petani. Sekaligus menciptakan pasarnya. Bukan hanya di lokal tapi juga pasar internasional. Yang lebih utama yakni, mengupayakan kaum milenial untuk mau bertani dan diarahkan untuk membuka lahan pertanian. Para penyuluh pertanian diharapkan bisa mendampingi mereka.

“Ke depan kita akan diskusikan lagi, terkait peluang bisnis apa dari sektor pertanian yang menjanjikan bagi milenial. Tidak hanya menanam untuk hidup, tapi bagaimana cara berbisnis,” paparnya.

Dia juga berpesan kepada para penyuluh pertanian agar menyampaikan kepada para petani perihal prospek sektor pertanian yang cukup menjanjikan pada masa sekarang, jika dikelola dengan baik dan benar dan tentunya didukung dengan peralatan modern. (adv)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman melakukan reses di Kampung Sei Bebanir Bangun.

RESES MASA SIDANG III, SAKIRMAN TERIMA BERAGAM ASPIRASI WARGA SEI BEBANIR BANGUN

TANJUNG REDEB – Untuk terakhir kalinya pada tahun ini, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman melakukan reses masa persidangan III di daerah pemilihan (dapil)-nya. Kali ini dilakukan di Kampung Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung, Kamis (19/10/2023).

Pertemuan dihadiri staf Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sambaliung, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, staf Balai Benih Ikan, serta para milenial dari jurusan pertanian, baik SMK maupun universitas.

Sakirman mengakui, potensi di Kampung Sei Bebanir Bangun didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan. Karena itu perlu pembinaan dan pendampingan agar penghasilan para petani dan nelayan dapat meningkat. Dirinya juga ingin tahu lebih dalam terkait persoalan yang terjadi di lapangan.

Adapun permasalahan yang mengemuka yakni kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), perizinan lahan hingga pasar yang belum pasti. Itu perlu ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten, selain terkait pemetaan lahan produktif juga untuk perluasan lahan.

“Yang perlu dijaga yaitu agar petani tidak alih

fungsi lahan. Jadi bagaimana cara kita mendukung para petani untuk terus mau mengembangkan pertaniannya. Apalagi tidak ada regenerasi, banyak petani yang sudah usia tua,” terangnya.

Bila kekurangan sumber daya manusia (SDM) sektor pertanian katanya, solusinya menyediakan peralatan modern. Tanggung jawab sebagai pemerintah kabupaten yakni membantu mereka menyediakan peralatan yang modern tersebut. Agar kegiatan pertanian semakin mudah dan menyenangkan. Daerah-daerah sentra pertanian perlu dipetakan untuk mengetahui kekurangannya.

“Untuk kebutuhan alsintan juga begitu, mana kampung yang sudah memiliki mesin pertanian dan apa yang menjadi kekurangan mereka perlu dipetakan lagi,” tegasnya.

Sakirman berharap reses yang dilakukannya di Kampung Sei Bebanir Bangun tersebut bisa mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat. Baik melalui dana pokok pikiran (pokir) maupun APBD Berau. “Semua sudah saya catat, Insya Allah akan saya perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga Sei Bebanir Bangun,” tutupnya. (adv)



DUA PERAMPOK MINIMARKET ALFAMIDI DITANGKAP, PELAKUNYA WARGA PPU DAN BALIKPAPAN



**PELAJAR SMAN 3 UNGGULAN
TENGGARONG JUARA I DUTA
PELAJAR SADAR HUKUM 2023**



Warga PPU dan Balikpapan Jadi Pelaku Perampokan Alfamidi, Ditangkap Kurang dari 24 Jam

DUA PERAMPOK MINIMARKET ALFAMIDI DITANGKAP, PELAKUNYA WARGA PPU DAN BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Dua perampok yang melakukan aksinya di minimarket Alfamidi di Perum Batuah, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, pada Rabu (19/10/2023) pukul 23.00 Wita, berhasil ditangkap oleh Tim gabungan dari Opsnal Jatanras Polda Kaltim, Polresta Balikpapan, dan Polsek Balikpapan Utara.

Identitas kedua pelaku yang sempat melarikan diri tersebut adalah Alan Surya Prayogo (23) dan Ramadhan Nur Prasetyo (23).

Alan Surya adalah warga Penajam Paser Utara (PPU) yang tinggal di Jl. H. Muh Kasim Rt. 01 Desa Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU. Sementara itu, Ramadhan Nur Prasetyo (23) merupakan warga Balikpapan yang tinggal di Jl. DI Panjaitan Rt. 03 No. 30 Kel. Gn. Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara.

Kapolsek Balikpapan Utara,

AKP Bitab Riyani, menyatakan bahwa keduanya berhasil ditangkap dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda.

"Penangkapan tersangka masing-masing dilakukan di rumah kontrakannya. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk proses lebih lanjut," ujarnya, Jumat (20/10/2023).

Bitab menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan bersama kedua tersangka mencakup satu buah sabit berukuran 40 cm, satu buah pisau dapur berukuran 30 cm, pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat melakukan aksi kejahatan, serta tas selempang dan zebo. "Selain itu, juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp 1.050.000," jelasnya.

Adapun kronologis kejadian dimulai ketika kedua pelaku me-

masuk ke minimarket yang pintu rolldoor-nya tidak tertutup dengan rapat. Salah satu pelaku membawa sabit dan mengambil uang dari meja kasir.

Kemudian pelaku naik ke lantai 2 menuju brankas yang kuncinya masih tergantung. "Mereka berhasil membuka brankas dan mengambil uang di dalamnya," ungkapnya.

Setelahnya, pelaku mendobrak pintu kamar mandi dan mengarahkan sabit ke saksi yang berada di tempat tersebut. Pelaku kemudian meminta kunci pintu depan sebelum melarikan diri ke arah hutan.

Saat ini, Polsek Balikpapan Utara masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kedua tersangka. "Pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Rafi dan Meylisa dari SMAN 3 Unggulan Tenggarong keluar sebagai Juara I Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) tahun 2023.

PELAJAR SMAN 3 UNGGULAN TENGGARONG JUARA I DUTA PELAJAR SADAR HUKUM 2023

BALIKPAPAN - Pasangan Rafi Pramana Putra dan Meylisa Hadi Yanti Pramana Putra dari SMAN 3 Unggulan Tenggarong berhasil meraih gelar Juara I dalam kompetisi Duta Pelajar Sadar Hukum (DPSH) tahun 2023.

Kemenangan pasangan ini datang setelah mereka bersaing dengan 28 pasangan lainnya dari 10 Kabupaten/Kota dalam kompetisi yang berlangsung selama 3 hari, di Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis (19/10/2023) malam.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Hari Setiyono, secara langsung memberikan trofi, piagam, dan uang pembinaan kepada para pemenang.

"Kegiatan ini bukan akhir bagi para duta pelajar sadar hukum, tetapi ini merupakan awal bagi para juara untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari dan tampilkan di depan juri," ujarnya.

Lebih lanjut, Hari menjelaskan bahwa program DPSH merupakan satu-satunya program di Indonesia yang diadakan oleh Kejati Kaltim. Harapannya, program ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

"Kami berharap ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia," jelasnya.

Hari mengungkapkan keprihatinannya kare-

na di beberapa daerah di Indonesia, terdapat oknum pelajar yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, melalui ajang Duta Pelajar Sadar Hukum ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar.

"Semoga hal ini adalah salah satu langkah kami dalam memberikan penyuluhan hukum untuk menjadikan masyarakat yang taat pada hukum, dimulai dari kalangan pelajar," tambahnya.

Dalam ajang DPSH 2023, selain meraih gelar Juara 1, pasangan Meylisa Hadi Yanti dan Rafi Pramana Putra dari SMAN 3 Unggulan Tenggarong, Rafi Pramana Putra juga meraih gelar Best Speaker.

Juara 2 ditempati oleh Amin Fatku Rohman dan Innaysila Rismaulidinas Aziz dari SMAN 1 Long Ikis. Sementara Juara 3 diraih oleh Atika Rahma Dita dan Huakbar Priyanto Putra dari SMAN 1 Rantau Pulung.

Muhammad Rikza Rizqi Amrulloh dan Amanda Khairunniswara dari SMAN 2 Balikpapan dinobatkan sebagai Juara Favorit. (Bom)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus Susanto



Anggota Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Azis dalam paparannya pada Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik bersama sejumlah media di Kota Balikpapan, di Hotel Horizon Ulima Bandara Balikpapan, Jumat (20/10).

BAWASLU BALIKPAPAN GANDENG MEDIA UNTUK KAWAL PEMILU 2024

BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menggelar Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik, di Hotel Horison Ulima Bandara Balikpapan, pada Jumat (20/10). Dalam kegiatan ini, Bawaslu melibatkan sejumlah media di Kota Balikpapan untuk bersama-sama melakukan Pengawasan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Jumat (20/10/2023).

Anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmad Azis mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan terkait program Bawaslu yang mengajak kerjasama masyarakat atau lembaga dalam hal pengawasan Pemilu mendatang.

"Bagaimana peran media dalam pengawasan pemilu? Karena itulah, Bawaslu melibatkan seluruh kalangan masyarakat atau lembaga, termasuk hari ini dengan media," ujarnya.

Ahmad menjelaskan, dengan keterlibatan media di dalam pengawasan pemilu tahun 2024 ini bisa memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat serta menghindari disinformasi lebih lagi berita bohong alias hoax.

"Pola kerjasama kedepannya dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat.

Media bisa mencerdaskan masyarakat untuk tidak lagi ada mempolitikasi, misalkan isu hoax kemudian politik identitas juga isu sara dan segala macam," jelasnya.

Bawaslu Kota Balikpapan pun berharap dengan tujuan kebaikan bersama dalam pengawasan pemilu tahun 2024, dapat membangun bangsa, kota dan wilayah ini dengan wakil-wakil rakyat yang berintegritas.

"Masyarakat bisa memilih pemimpin yang berintegritas. Karena kita mengharapkan nanti, pemilu 2024 kita menghasilkan wakil rakyat berintegritas. Tidak hanya pemilu tapi juga pilkada 2024 yang serentak kita harapkan begitu," tambah Ahmad Azis, yang membawahi Divisi Pencegahan Bawaslu Balikpapan.

Ahmad pun mengakui jika dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu perlu kerjasama khususnya dengan media-media. "Sehingga kita berharap teman-teman media ini dapat bekerjasama dengan kami, karna kalau hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan itu tidak bisa segalanya kita lakukan," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA
TERDEPAN

RADAR PASER

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM

EDISI SABTU
21 OKT 2023



PASER ADOPTI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

**DALAM WAKTU DEKAT ADA
PERGESERAN PTP
DI LINGKUNGAN PEMKAB PASER**





Bupati Paser, Fahmi Fadli (baju coklat) ingin mengetahui lumbung pangan Provinsi Bali.

PASER ADOPTI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

PASER - Banyak perbedaan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan produksi serta produksi tanaman pangan maupun hortikultura yang menarik untuk diketahui.

Salah satunya di Kabupaten Tabanan untuk 1 hektare sawah menghasilkan 8 ton beras, sementara Paser hanya 4 ton per hektare. Bahkan daerah yang bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Badung itu menjadi daerah agraris dengan predikat lumbung pangan Bali.

Pada 2022 lalu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menganugerahi Kabupaten Tabanan indeks ketahanan pangan (IKP) terbaik I dengan poin sebesar 92,20. Capaian inilah salah satu menjadi alasan dari Pemkab Pas-

er melakukan studi tiru. Dengan harapan dapat diadopsi.

Bupati Paser, Fahmi Fadli menyebut beberapa hal dapat dipelajari dari Kabupaten Tabanan. Antara lain regulasi mempertahankan lahan pertanian untuk tak beralihfungsi. Pasalnya, di wilayah selatan Kaltim itu banyak telah menjadi konversi lahan perkebunan kelapa sawit.

"Secara ekonomi masyarakat menilai kelapa sawit ini jauh lebih mudah dibanding menanam padi, setiap dua pekan sudah bisa panen dan dengan harga TBS (tandan buah segar) sampai Rp 2 ribu per kilogram," ucap Fahmi, Kamis (19/10/2023).

Fahmi ingin mengetahui bagaimana upaya Pemkab Paser dalam mengawasi tak terjadinya alihfungsi lahan. "Apakah diper-

lukan pengawasan tokoh adat, tokoh agama agar masyarakat tidak mengubah atau mengalihkan fungsi lahan," sambungnya.

Selain itu berbagai cerita perihal tantangan dihadapi petani dari mulai proses produksi hingga pemasaran. Begitupun dengan program meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana penunjang.

Apalagi Kabupaten Tabanan mampu menciptakan sawah menjadi destinasi wisata berbasis pertanian. Seperti lahan pertanian subak bengkel di Kecamatan Kediri dan Jati Luit. "Kalau Tabanan sudah sampai ke pariwisata. Oleh karena itu, kami bersama rombongan ingin belajar bagaimana mengelola pertanian untuk bisa diadopsi," aku Fahmi.

Lanjutan Utama

Sekadar diketahui, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Paser 2021-2026, untuk 2023 mengusung tema pengembangan industri pengolahan berbasis masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Sisi lain menjadi daerah penyangga hadirnya IKN Nusantara.

"Paser penyangga IKN, kami khawatir saja pasokan pangan kami kurang dan juga harus bisa memenuhi kebutuhan pangan di IKN dan Kabupaten Paser," sebutnya.

Dikatakannya, untuk peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Paser saat ini banyak dilakukan pengerjaan peningkatan kualitas jalan usaha tani. "Ini untuk membantu akses masyarakat dan petani," tutur Fahmi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, Erwan Wahyudi telah melihat langsung pengembangan lahan pertanian subak bengkel. Ia mengatakan studi tiru ke Kabupaten Tabanan karena mensupport pangan untuk Provinsi Bali.

"Salah satu yang menarik itu sistem pengairannya, kemudian budaya orang mau bertani dan ini yang mau kami tiru apa rahasianya" kata Erwan.

Ia mengungkapkan budaya sosial masyarakat meyakini usaha tani sawah ini erat hubungannya dengan kepercayaan. "Jadi selama itu masih belum panen, dianggapnya perwujudan dari Dewi Sri," ungkapnya.

Kabupaten Tabanan cara menanamnya jajar legowo yakni cara tanam berselang-seling dua baris dan satu baris dan memaksimalkan fotosintesis. Sementara di Paser cara tanam padi sistem tabela.

Kata Erwan, di Kabupaten Paser terdapat aturan dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk melindungi lahan pertanian. Sementara Kabupaten Tabanan namanya lahan sawah abadi.

"Sebenarnya programnya sama saja.

Kalau kami LP2B masih dikerjakan, namun di Tabanan benar-benar sudah aturan final. Jadi betul-betul melindungi, sedangkan kita baru sebatas aturan," terangnya.

Ia menjelaskan saat ini lahan pertanian di Kabupaten Paser tersisa 9 ribu hektare. Sementara kurun waktu 2 tahun terakhir terjadi alihfungsi lahan ke kelapa sawit sebanyak 1.000 hektare. "Mudahan-mudahan apa yang kita dapat dari Kabupaten Tabanan bisa diujicoba di Kabupaten Paser," harap Erwan.

Rombongan Pemkab Paser diterima Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila. Ia mengatakan wilayah yang memiliki 10 kecamatan ini memiliki objek wisata berbasis pertanian dan telah tercatat di Unesco.

"Di sini ada lahan pertanian subak Bengkel dan Jati Luit. Jadi selain ramai wisatawan ini juga upaya kita melestarikan pertanian," jelas I Gede Susila.

Saat pandemi Covid-19 Kabupaten Tabanan tak ada masalah mengenai pangan. Karena masyarakatnya dapat memanfaatkan lahan kosong atau tak terawat untuk ditanami padi. "Lahan yang ditinggal masyarakat, saat pandemi Covid-19 kembali digarap. Dulu ilang-ilang tanaman yang tidak terpelihara dan ditanami kembali," bebernyanya.

Dalam peningkatan sektor pertanian yang memiliki aturan, untuk pelatihan SDM hingga pemasaran bekerja sama dengan perguruan tinggi. "Sehingga berbagai kegiatan pertanian nasional bisa dilaksanakan di tempat kami," akunya.

Upaya mengendalikan agar tak terjadi alihfungsi lahan pertanian dan melestarikan alam, dikatakannya kebijakan bupati Tabanan terkait program yang dicanangkan semaksimal mungkin tidak merusak alam untuk menata pariwisata.

"Namun menata pariwisata untuk melestarikan alam. Semoga kita sama-sama dapat semakin meningkatkan sektor pertanian," tandasnya. (bs)



Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito

DALAM WAKTU DEKAT ADA PERGESERAN PTP DI LINGKUNGAN PEMKAB PASER

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dipastikan bakal melakukan pergeseran jabatan bagi Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau setingkat eselon II dilingkungan Pemkab Paser, pasca sejumlah jabatan yang ada, kini mengalami kekosongan.

Kepastian itu berdasarkan sudah berlangsungnya proses job fit atau evaluasi kinerja terhadap sejumlah Kepala Dinas, Kepala Badan atau jabatan yang setara, oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser.

Kepala BKPSDM Kabupaten Paser, Suwito membenarkan, telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap 5 PTP dilingkungan Pemkab Paser sebagai dasar untuk pergeseran mengisi suatu jabatan yang kosong.

"Sudah kami lakukan uji kompetensi, ada 5 pejabat yang diperintahkan untuk ikut job fit," kata Suwito saat

dihubungi.

Kelimitya itu, yakni Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Paser, Inayatullah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Hasanuddin, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati.

Selain itu Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Paser, Arief Rahman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Paser, M. Isnaini Yanuardi.

Dari hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja itu, dijelaskan Suwito, nantinya ada diberikan rekomendasi kepada Bupati Paser, Fahmi Fadli. Dari rekomendasi itu, selanjutnya ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hasil tindaklanjut ke KASN, lanjut Suwito, nantinya jadi acuan Kepala Daerah untuk menempatkan pe-

jabat yang telah di uji kompetensinya. "Rencana, saya akan segeta menghadap ke Bupati menyampaikan hasil dari panitia seleksi tersebut," kata Suwito.

Diterangkan Suwito, bahwa menentukan penempatan jabatan dan jadwal pelantikan merupakan kewenangan Bupati. Belum diketahui secara pasti nantinya hasil dari uji kompetensi tersebut, lantaran merupakan pertimbangan penuh pimpinan.

"Pejabat yang di job fit bisa tetap di jabatannya, bisa juga bergeser. Semua kemungkinan bisa terjadi, tergantung kehendak pimpinan," katanya.

Untuk diketahui, jabatan PTP yang kosong, yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Paser, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Paser dan Dinas Kesehatan (Dinkes). (bs)